

KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 14 Januari 2011

Subyek : Lumpur Lapindo

Hal : 22

LUMPUR LAPINDO Polisi Usut Kelebihan Bayar

SIDOARJO, KOMPAS - Aparat kepolisian diminta mengusut tuntas kasus kelebihan bayar terhadap korban lumpur Lapindo di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Hal itu mengemuka dalam mediasi yang dilakukan DPRD Sidoarjo, Kamis (13/1) di Kantor DPRD Sidoarjo. Dalam mediasi, hadir delapan orang dari sembilan warga yang menerima kelebihan bayar, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso, dan Kepala Desa Besuki Mohammad Shirot. Mediasi dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Mundzir Dwi Ilmiawan.

Kasus kelebihan bayar ini berawal saat BPLS membeli tanah milik sembilan warga Besuki untuk pembuatan kolam penampungan lumpur. Dalam akta jual beli dengan pemilik tanah tahun 2008, luas tanah milik sembilan warga itu 2,1 hektar.

Padahal, luas sebenarnya 1,3 hektar. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran untuk lahan 0,8 hektar senilai Rp 1,12 miliar. Namun, BPLS baru membayar 560 juta (50 persen).

Staf Humas BPLS Akhmad Kusairi menyesalkan, Kepala Desa Besuki tidak segera memberi tahu jika terjadi kelebihan ukur tanah warga. Kelebihan ukur baru diketahui BPLS setelah tanah dibayar akhir 2009. Satu warga sudah mengembalikan kelebihan uang pembayaran kepada BPLS.

"Kami sudah meminta kepada delapan warga Besuki untuk mengembalikan kelebihan pembayaran kepada BPLS. Namun, mereka menolak," kata Kusairi.

Kepala Desa Besuki M Shirot menolak dianggap bersalah. Menurut dia, pascapengukuran tanah warga yang dibeli BPLS, pihaknya telah mengumumkan luas tanah 2,1 hektar selama tujuh hari. Namun, tidak ada pihak yang meralat.

Kuasa hukum delapan warga Besuki, Yunus Susanto, mengatakan, sampai saat ini akta jual beli tanah milik warga masih berlaku. Menurut dia, belum ada perubahan atas akta jual beli itu. Karena itu, ia menyatakan tidak ada kelebihan pembayaran. Uang yang dibayarkan BPLS kepada warga nilainya sudah sesuai dengan luas tanah seperti yang tercantum dalam akta jual beli.

Kasus kelebihan pembayaran sudah sampai di tangan aparat Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo. Polisi kini tengah memeriksa saksi-saksi yang terkait dalam kasus ini, seperti Kepala Desa Besuki, warga pemilik tanah, serta aparat Desa Besuki. Dalam waktu dekat, polisi akan meminta keterangan dari BPN Sidoarjo dan BPLS.

"Kami terus mengusut tuntas kasus ini. Saat ini dalam tahap penyelidikan, yaitu meminta keterangan para saksi. Jika ada sedikitnya dua alat bukti, akan ada tersangka dalam kasus ini," kata Wakil Kepala Polres Sidoarjo Komisaris Leo Simarmata. (APO)